



## LAPORAN SINGKAT

### KOMISI VI DPR RI

#### **BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI**

---

Rapat ke	:	27 ( <i>dua puluh tujuh</i> )
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Hari, Tanggal	:	Selasa, 22 September 2020
Pukul	:	10.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Faisol Riza, Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Penyesuaian RKA K/L TA 2021 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran
Hadir	:	1. dari 54 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. Menteri BUMN, Erick Thohir; 3. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; 4. Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto; 5. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki; dan 6. Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. beserta jajaran.

#### **I. PENDAHULUAN**

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM dan Kepala BKPM pada pukul 10.45 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada hari Selasa, 22 September 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Faisol Riza.
3. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/10702/DPR RI/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 Perihal Penyampaian Perubahan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA. 2021 dan Surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor AG/11022/DPR RI/IX/2020 Tanggal 17 September 2020 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN 2021.

## II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian BUMN sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-692/MK.02/2020 dan Menteri PPN/Bappenas Nomor B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 Tanggal 5 Agustus 2020 sebesar **Rp244.827.483.000,-** (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam 2 (*dua*) program yang terdiri atas:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp158.273.280.000,-** (*Seratus Lima Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
  - b. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar **Rp86.554.203.000,-** (*Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Perindustrian sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-692/MK.02/2020 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 Tanggal 05 Agustus 2020 sebesar **Rp3.181.384.901.000,-** (*Tiga Triliun Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam 4 (*empat*) program yang terdiri atas:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp1.443.631.772.000,-** (*Satu Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*);
  - b. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar **Rp663.361.351.000,-** (*Enam Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*);
  - c. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar **Rp112.367.167.000,-** (*Seratus Dua Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
  - d. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar **Rp962.024.611.000,-** (*Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Miliar Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-692/MK.02/2020 dan Menteri PPN/Bappenas Nomor B.636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 Tanggal 05 Agustus 2020 sebesar **Rp978.289.099.000,-** (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam 2 (*dua*) program yang terdiri atas:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp352.326.654.000,-** (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*);
  - b. Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi sebesar **Rp625.962.445.000,-** (*Enam Ratus Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
4. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Perdagangan sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-692/MK.02/2020 dan Kepala Bappenas Nomor B-636/M.PPN/D.8/KU.01.01/08/2020 Tanggal 05 Agustus 2020 sebesar **Rp3.028.964.712.000** (*Tiga Triliun Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam 4 (*empat*) program yang terdiri atas:
  - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp1.401.929.026.000,-** (*Satu Triliun Empat Ratus Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*);

- b. Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar **Rp973.594.468.000,-** (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*);
  - c. Program Perdagangan Luar Negeri sebesar sebesar **Rp643.271.218.000,-** (*Enam Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*);
  - d. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar **Rp10.170.000.000,-** (*Sepuluh Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
5. Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-826/MK.02/2020 tanggal 17 September 2020 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga T.A 2021 Hasil Kesepakatan Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN TA 2021 yang semula **Rp589.500.127.000,-** (*Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) mendapatkan penambahan anggaran sebesar **Rp500.000.000.000,-** (*Lima Ratus Miliar Rupiah*) sehingga total anggaran menjadi **Rp1.089.500.127.000,-** (*Satu Triliun Delapan Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam 2 (*dua*) program yang terdiri atas:
- a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp317.292.383.000,-** (*Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah*);
  - b. Program Penanaman Modal sebesar **Rp772.207.744.000,-** (*Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
6. Komisi VI DPR RI menyetujui untuk memperjuangkan penambahan Pagu Anggaran pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2021 atau APBN Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
- a. Kementerian Perindustrian sebesar **Rp298.352.050.000,-** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang dialokasikan dalam 3 (*tiga*) program yang terdiri atas:
    - 1) Penyiapan Infrastruktur Dalam Rangka Kebijakan *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) sebesar **Rp25.000.000.000,-** (*Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*);
    - 2) Fasilitas Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI Wajib) dan Penguatan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) sebesar **Rp109.852.050.000,-** (*Seratus Sembilan Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*);
    - 3) Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar **Rp163.500.000.000,-** (*Seratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*).
  - b. Kementerian Koperasi dan UKM sebesar **Rp48.919.950.000.000,-** (*Empat Puluh Delapan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) untuk dialokasikan dalam beberapa program antara lain:
    - 1) Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro sebesar **Rp48.030.000.000.000,-** (*Empat Puluh Delapan Triliun Tiga Puluh Miliar Rupiah*) dengan target 20.000.000 (*Dua Puluh Juta*) usaha mikro;
    - 2) Program Pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebesar **Rp309.000.000.000,-** (*Tiga Ratus Sembilan Miliar Rupiah*) dengan target 15.000 (*Lima Belas Ribu*) UMKM;
    - 3) Program Digitalisasi Koperasi dan UMKM sebesar **Rp300.000.000.000,-** (*Tiga Ratus Miliar Rupiah*) dengan target 5.000.000 (*Lima Juta*) Koperasi dan UMKM;
    - 4) Program Penguatan Kewirausahaan sebesar **Rp90.000.000.000,-** (*Sembilan Puluh Miliar Rupiah*) dengan target 8.000 (*Delapan Ribu*) orang;

- 5) Program Pengembangan Arsitektur dan Sistem Pengawasan Koperasi sebesar **Rp60.000.000.000,-** (*Enam Puluh Miliar Rupiah*) dengan target 2.750 (*Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh*) Koperasi;
  - 6) Afirmasi Pengembangan Koperasi melalui Gerakan sebesar **Rp20.000.000.000,-** (*Dua Puluh Miliar Rupiah*);
  - 7) Program Peningkatan Layanan Pemasaran pada LLP-KUKM sebesar **Rp10.000.000.000,-** (*Sepuluh Miliar Rupiah*) dengan target 250 (*Dua Ratus Lima Puluh*) UMKM;
  - 8) Pengembangan jaringan Usaha Koperasi (Revitalisasi pasar) sebesar **Rp30.000.000.000,-** (*Tiga Puluh Miliar Rupiah*);
  - 9) Penguatan Pendampingan bagi UKM (PLUT-KUMKM) sebesar **Rp30.000.000.000,-** (*Tiga Puluh Miliar Rupiah*);
  - 10) Pendampingan kepada kelompok Masyarakat untuk membentuk Koperasi sebesar **Rp1.850.000.000,-** (*Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
  - 11) Perluasan Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro melalui *E-Commerce/Online* sebesar **Rp6.000.000.000,-** (*Enam Miliar Rupiah*);
  - 12) Peningkatan Manajemen dan Mutu Produk UKM sebesar **Rp5.600.000.000,-** (*Lima Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*);
  - 13) Usaha Mikro yang difasilitasi Terdampak Bencana sebesar **Rp12.000.000.000,-** (*Dua Belas Miliar Rupiah*);
  - 14) Pendampingan dan peningkatan bagi Usaha Mikro (KUR dan SHAT) sebesar **Rp500.000.000,-** (*Lima Ratus Juta Rupiah*); dan
  - 15) Dukungan pengembangan Usaha Mikro melalui Pendekatan klaster/Komoditas sebesar **Rp15.000.000.000,-** (*Lima Belas Miliar Rupiah*).
- c. Kementerian Perdagangan sebesar **Rp1.344.050.270.000** (*Satu Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Empat Miliar Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) yang baru terakomodir sebesar **Rp194.815.000.000** (*Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Rupiah*)
7. Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan secara seksama dan meminta mitra-mitra kerja untuk memberikan laporan secara berkala atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.31 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI  
KETUA RAPAT,**

TTD.

**FAISOL RIZA  
A-33**